

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sengketa Laut China Selatan merupakan masalah yang hingga saat ini belum juga terselesaikan. Sengketa tersebut terjadi karena tumpang tindih klaim antara negara-negara yang bersengketa. Negara-negara yang mengklaim wilayah Laut China Selatan antara lain adalah China, Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Taiwan. Tidak adanya batas teritorial yang jelas atas kepemilikan kawasan Laut China Selatan membuat mereka bertindak sesuai dengan hukum yang mereka anut.

Negara-negara tersebut mengklaim wilayah Laut China Selatan atas dasar alasan historis maupun geografis. Seperti halnya China yang mengklaim wilayah Laut China Selatan dengan berdasarkan kepemilikan bangsa China sejak bertahun-tahun lamanya, China meyakini bahwa pendahulu China sejak 2 abad sebelum masehi yaitu Dinasti Han yang menemukan pulau dan Laut China Selatan pertama kali dan menduduki kawasan laut serta dua gugusan kepulauan Spratly dan Paracel.¹ Pada 1947, pemerintah China telah meluncurkan peta yang merincikan kedaulatan China atas Laut China Selatan yaitu sembilan garis putus-putus atau dikenal juga sebagai *nine-dash line*.²

¹ Evi Sulistiyani & Arinto Nugroho. "Penyelesaian Sengketa Batas Landas Kontinen Di Laut China Selatan Antara China Dengan Filipina, Vietnam, Malaysia Dan Brunei Darussalam" *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 4 (2016), p. 3 dalam <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/18535>

² Muhar Junef. "Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan" *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 18, No. 2 (2016), p. 220 dalam <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/420>

Tumpang tindih klaim di wilayah Laut China Selatan membuat negara-negara yang bersengketa sering menghadapi permasalahan yang melibatkan kekuatan militer masing-masing negara. Hal tersebut mereka lakukan untuk mempertahankan dan memperjuangkan klaim negara mereka atas wilayah Laut China Selatan. Tentu saja, permasalahan ini dapat memperkeruh serta mengganggu stabilitas kawasan, terkadang permasalahan sengketa ini mengakibatkan terganggunya kepentingan negara-negara yang berlokasi di sekitar kawasan Laut China Selatan.

Wilayah Laut China selatan menyimpan kekayaan alam yang sangat melimpah, seperti kandungan minyak serta gas bumi. Lalu, perairan Laut China selatan merupakan jalur pelayaran kapal-kapal internasional dan perdagangan lintas laut yang menghubungkan tiga jalur perdagangan yaitu, Eropa, Amerika, dan Asia. Kawasan Laut China Selatan dinilai sangat strategis dan akan memberikan keuntungan ekonomi yang sangat besar apabila negara-negara tersebut berhasil menguasainya. Tidak hanya negara-negara Asia Tenggara saja yang ingin menguasai kawasan Laut China Selatan, bahkan Amerika Serikat juga memiliki keinginan untuk menguasai kawasan tersebut.³

Pada saat melakukan pembacaan pidato di Singapura 2015 lalu, Xi Jinping menyatakan bahwa:

“Pulau-pulau yang berada di Laut China Selatan merupakan bagian dari wilayah China sejak zaman kuno, maka dari itu pemerintah

³ Muhar Junef. pp. 221.

China harus bertanggung jawab dalam melindungi kedaulatan teritorial dan maritim yang sah.”

Ia juga mengatakan China akan berupaya berintegrasi lebih dekat dengan negara-negara tetangganya dan China membuka lebar jalan bagi negara tetangga untuk turut serta dalam pembangunan China agar dapat menikmati kehidupan yang lebih baik.⁴

Melihat konflik sengketa Laut China Selatan yang semakin memanas, Xi Jinping mengatakan bahwa China akan berusaha meredam kasus sengketa wilayah maritimnya menggunakan jalan damai sesuai dengan pembangunan *Peaceful Rise* China, tanpa menggunakan kekuatan militer agar menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, tetapi China akan tetap mempertahankan klaimnya atas Laut China Selatan sebagai upaya melindungi hak dan kepentingan inti nasional China. Jalan damai yang dilakukan China adalah dengan cara melakukan *Bilateral Consultative Mechanism* (BCM) dengan Filipina agar tidak terus menimbulkan konflik. Kerja sama bilateral dilakukan untuk meredam sengketa yang terjadi agar tidak terus memanas.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut, “Bagaimana pendekatan *Bilateral Consultative Mechanism* China-Filipina dalam meredam sengketa di Laut China Selatan?”

⁴ Edward Wong, “Xi Again Defends China’s Claim to South China Sea Island” The New York Times, dalam <https://www.nytimes.com/2015/11/08/world/asia/xi-jinping-china-south-china-sea-singapore.html> diakses pada 10 Februari 2022.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam menyelesaikan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana *Bilateral Consultative Mechanism* sebagai jalan damai yang dipilih oleh China dan Filipina dalam meredam sengketa Laut China Selatan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademis

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam Hubungan Internasional terutama tentang bagaimana *Bilateral Consultative Mechanism* sebagai jalan damai yang dipilih oleh China-Filipina dalam meredam sengketa Laut China Selatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong munculnya penelitian lain dengan topik yang sama.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang bagaimana *Bilateral Consultative Mechanism* China-Filipina di wilayah Laut China Selatan. Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

1.4. Kajian Pustaka (Literatur Review)

Pada era kepemimpinan Xi Jinping ia lebih mengedepankan isu sengketa Laut China Selatan, karena kawasan perairan tersebut merupakan wilayah yang sangat strategis dan menyimpan sumber daya alam baik hayati dan non-hayati yang sangat melimpah, beragam upaya telah China lakukan untuk meredam sengketa, seperti melakukan beberapa kerja sama dengan negara-negara yang

turut serta mengklaim Laut China Selatan. Peneliti akan mengulas beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik ini.

Tulisan pertama adalah jurnal yang berjudul “*The South China Sea Issues: A Critical Appraisal of China’s Geo-economic Strategy*” Oleh Romi Jain pada tahun 2019. Jurnal ini membahas strategi yang dilakukan China untuk tetap dapat mempertahankan klaimnya atas Laut China Selatan. Dengan berkembangnya ekonomi China, membuat negara tersebut semakin berupaya untuk mempertahankan hak mereka di Laut China Selatan. China berupaya agar para pesaing-pesaingnya yang juga mengklaim Laut China Selatan dapat menjadi mitranya dengan melakukan kerja sama. Salah satu upaya China adalah menggunakan strategi geo-ekonomi.

China melakukan pendekatan strategi geo-ekonomi terhadap Filipina untuk menghindari konflik serta pertempuran di wilayah Laut China Selatan. Melihat proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) yang dimiliki China berhasil mendorong pembangunan infrastruktur di Myanmar, Kamboja dan Laos, mendorong Filipina untuk dapat turut serta mengikuti proyek BRI tersebut. Filipina ingin mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara lain yang lebih dulu berintegrasi dengan China.

Pada November 2018 China berhasil mendapatkan keuntungan strategis pada saat melakukan kunjungan ke Filipina dan Brunei. Xi Jinping menandatangani nota kesepahaman bersama masing-masing negara untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan pengembangan minyak serta gas bersama di Laut China Selatan. Didasari oleh kebutuhan Filipina akan sumber daya minyak

dan gas Laut China Selatan, mendorong Filipina melakukan eksplorasi bersama, karena cadangan gas di Malampaya akan diperkirakan habis pada tahun 2030. Tetapi, meskipun Filipina telah setuju melakukan kerja sama dengan China, hal tersebut tidak membuat Filipina mencabut klaimnya atas Laut China Selatan. Filipina juga tidak ingin Laut China Selatan menjadi milik bersama. Sehingga walaupun melakukan kerja sama bilateral Filipina tetap berhati-hati dalam menjalin kerja sama dengan China, agar tidak merugikan negara Filipina sendiri.⁵

Tulisan kedua merupakan jurnal yang berjudul “*China-Philippines Joint Development of South China Sea Hydrocarbon Resources: Challenges and Future Priorities*” Oleh Kang Lin dan Luo Chuanyu pada tahun 2018.⁶ Jurnal ini membahas kerja sama yang dilakukan antara China dan Filipina dalam memanfaatkan sumber daya minyak dan gas di Laut China Selatan. Filipina sangat bergantung pada minyak impor dan untuk mengurangi tekanan impor energi serta mengurangi ketergantungan kepada pasar energi internasional, Filipina berupaya meningkatkan eksplorasi sumber daya hidrokarbon di Laut China Selatan. Filipina juga berupaya untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan minyak Barat untuk dapat bersama-sama mengembangkan sumber daya energi.

Salah satu pulau di Filipina yang di eksplorasi gasnya adalah pulau Malampaya yang secara resmi di operasikan pada 2001 dengan masa

⁵ Romi Jain, “The South China Sea Issues: A Critical Appraisal of China’s Geo-economic Strategy” *Indian Journal of Asian Affairs*, Vol. 32, No. 1 (2019) dalam <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter--823-20200730131623.pdf>

⁶ Kang Lin & Luo Chuanyu, “China-Philippines Joint Development of South China Sea Hydrocarbon Resources: Challenges and Future Priorities” *China International Studies* (2018) dalam <http://ciisjournal.com/Admin/UploadFile/Issue/toqgzxse.pdf>

penambangan selama 25 tahun. Karena ladang gas Malampaya akan segera di tutup, Filipina sedang mencari ladang gas baru untuk di eksplorasi. Filipina bersedia melakukan eksplorasi migas bersama China di perairan Laut China Selatan. Duterte selaku presiden Filipina, pada Juli 2017 mengatakan bahwa Filipina sangat menantikan eksplorasi bersama dengan China atas sumber daya minyak di Laut China Selatan. Lalu, pada bulan September Menteri energi Filipina Alfonso Cusi saat Pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-35, mengatakan ketersediaannya melakukan eksplorasi hidrokarbon bersama dengan China di Blok SC57 yang terletak di lepas pantai barat laut Teluk Palawan dan agenda kerja sama tersebut sedang dalam penyusunan.⁷

Daerah Blok yang akan di eksplorasi merupakan daerah yang di sengketa oleh China dan Filipina, sehingga kedua negara tersebut harus membahas terlebih dahulu permasalahan sengketa dengan menggunakan pedoman prinsip hukum internasional sebelum melakukan pengembangan dan pencapaian bersama. Lalu pada Agustus 2018 Filipina telah membentuk kelompok kerja teknis yang bertanggung jawab atas eksplorasi bersama di perairan yang disengketa dan kedua negara diharapkan agar segera menandatangani perjanjian kerja sama terkait eksplorasi.

Filipina sempat ragu melakukan kerja sama dengan China karena kasus sengketa Laut China Selatan. Filipina khawatir kerja sama tersebut dapat memperluas klaim China atas Laut China Selatan. Tetapi melihat kestabilan situasi Laut China Selatan antara China dan Filipina dapat memungkinkan kedua

⁷ Kang Lin & Luo Chuanyu. p.138

negara untuk menjalankan kerja sama mengembangkan sumber daya hidrokarbon di Laut China Selatan. Para sarjana Filipina juga mengatakan dukungan mereka untuk melakukan pembangunan bersama. Antara China dan Filipina harus saling menghentikan kegiatan pembangunan sepihak di Laut China Selatan agar tidak mempengaruhi klaim masing-masing negara.⁸

Tulisan ketiga adalah jurnal yang berjudul “*Joint Development in the South China Sea: China’s Incentives and Policy Choices*” oleh Huaigo Qi pada tahun 2019. jurnal ini membahas upaya yang dilakukan China agar sengketa Laut China Selatan tidak semakin memanas dan menawarkan kerja sama perdamaian. Sejak 2017 China sudah secara aktif melakukan diskusi dengan negara-negara pantai lainnya untuk melakukan pengembangan bersama terkait Laut China Selatan. Untuk melakukan pembangunan bersama, terdapat dua syarat yang harus di penuhi.

Syarat pertama sebelum melakukan pembangunan bersama, negara-negara pihak harus sedang berada dalam hubungan yang baik. China dengan negara pengklaim Laut China Selatan telah mengambil langkah guna membangun kepercayaan di antara mereka. Terciptanya *ASEAN-China Single Draft Negotiating Text of the Code of Conduct (COC)* telah menciptakan hubungan bilateral yang baik antara negara pengklaim. Syarat kedua adalah masing-masing partai harus memiliki keinginan politik yang memungkinkan pembuat keputusan menghadapi oposisi di dalam negara mereka. China dan negara-negara pengklaim Laut China Selatan berupaya mengambil langkah yang memperkuat alasan

⁸ Kang Lin & Luo Chuanyu. p. 141

mereka untuk melakukan pembangunan bersama. Pengembangan bersama ini bersifat sementara agar dapat melakukan eksplorasi bersama terkait sumber daya hidrokarbon di darat maupun lepas pantai.

Meningkatnya kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh China dan negara-negara pesisir Laut China Selatan merupakan alasan mereka untuk melakukan eksploitasi bersama terkait sumber daya minyak dan gas. Menteri Luar Negeri China yaitu Wang Yi memberikan usulan untuk membentuk rancangan kerja sama negara pesisir di Laut China Selatan. Provinsi Hainan mengusulkan untuk membuat Lingkar Kerja Sama Ekonomi Pariwisata Laut China Selatan pada tahun 2020 yang di fokuskan untuk memulai layanan internasional serta membuka jalur pelayaran yang baru.⁹

China dan Filipina juga menegaskan kembali bahwa mereka akan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang damai, meningkatkan rasa saling percaya serta menahan diri. China dan Filipina saling bertukar pandangan mengenai cara untuk meningkatkan kerja sama di bidang maritim seperti pencarian dan penyelamatan maritim, perlindungan lingkungan laut, dan perikanan. Pemerintah China dan Filipina telah merundingkan skema peraturan yang di percepat untuk melengkapi eksplorasi dan eksploitasi minyak serta gas di wilayah yang relevan.

Negara-negara pengklaim Laut China Selatan memiliki kewajiban untuk menahan diri dari tindakan sepihak di wilayah yang disengketakan termasuk pengeboran sepihak dan eksploitasi sumber daya secara sepihak. Dikarenakan

⁹ Huaigao Qi, "Joint Development in the South China Sea: China's Incentives and Policy Choices" *Journal of Contemporary East Asia Studies*, Vol. 8, No. 2 (2019) p. 226 dalam <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/24761028.2019.1685427>

tidak semua negara siap dan ingin melakukan pengembangan bersama, mereka dapat mencoba terlebih dahulu bekerja sama di area yang kurang sensitif sebagai permulaan. China bersama dengan Vietnam telah menandatangani penelitian kerja sama dalam pengelolaan lingkungan laut di Teluk Beibu dan sekitarnya, kerja sama tersebut telah membuahkan hasil yang positif. Berkat upaya pembangunan bersama antara China dan negara-negara pengklaim Laut China Selatan, situasi di wilayah tersebut menjadi damai dan stabil.¹⁰

Tulisan keempat yang menjadi bahan tinjauan pustaka adalah jurnal yang berjudul “*National Identity Analysis and Foreign Policy China Aggressive Stance in South China Sea Under Xi Jinping*” Oleh Anggia Rahmadini dan Citra Hennida pada tahun 2018. Dalam tulisan ini membahas kepentingan nasional China yang berubah menjadi keamanan nasional pada era kepemimpinan presiden Xi Jinping, di mana sebelumnya pada era kepemimpinan presiden Deng Xiaoping kepentingan nasional China berfokus pada pembangunan ekonomi sejak tahun 1970 sampai awal tahun 2010. Pada era Deng Xiaoping ia melakukan reformasi ekonomi dan memperluas kerja sama ekonomi dalam negeri sehingga keamanan nasional menjadi kepentingan sekunder saja dan mulai mengganggu proses reformasi ekonomi pada saat itu.¹¹

Pada era kepemimpinan Xi Jinping kepentingan nasional yang semulanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, bergeser menjadi keamanan nasional. Terdapat tiga jenis kepentingan nasional yaitu, *predatory security states*, *garrison*

¹⁰ Huaigao Qi, pp. 229.

¹¹ Anggia Rahmadini & Citra Hennida “National Identity Analysis and Foreign Policy China Aggressive Stance in South China Sea Under Xi Jinping” Airlangga Conference on International Relations (2018) p.436 dalam <https://www.scitepress.org/Papers/2018/102784/102784.pdf>

states, dan control states. Jenis keamanan nasional yang di anut Xi Jinping ialah *control states*. Keamanan nasional *control states* merupakan keamanan nasional yang di kendalikan negara, di mana pemerintah mengawasi sistem birokrasi baik keamanan internal maupun eksternal menggunakan aspek-aspek keamanan.¹² Seperti keamanan militer dan publik, keamanan hukum dan penyebaran informasi.

Kondisi negara merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional, di mana China sedang menghadapi sengketa Laut China Selatan dengan negara-negara Asia Tenggara. Berbagai ancaman eksternal maupun internal membuat pemerintah mengambil keputusan untuk membangun kekuatan serta pertahanan bagi China. Salah satu upaya memperkuat keamanan nasional China adalah dengan cara mempertegas kendali atas Kepulauan Spratly di Laut China Selatan. China berupaya mereklamasi dengan mengeruk tujuh pusat terumbu karang yang berada di pulau Spratly. Selain itu, China berupaya membangun fasilitas sipil dan fasilitas keamanan di pulau Paracel, serta mengirimkan rudal udara dan juga jet di pulau tersebut sebagai langkah mempertahankan klaimnya atas Laut China Selatan.

Pada era kepemimpinan Xi Jinping, China cenderung lebih agresif untuk mempertahankan klaimnya atas Laut China Selatan. Keinginan China menjadi negara adidaya dan meruntuhkan dominasi AS di kawasan Asia Pasifik membuat China memperkuat dan mempertegas kehadirannya di Laut China Selatan. Pada tahun 2015 China menerbitkan Buku Putih yang berisikan strategi pertahanan baru China. Strategi militer China yang semulanya adalah *defensive posture*

¹² Anggia Rahmadini & Citra Hennida. p. 437.

menjadi *active defense posture*. Strategi tersebut berisikan kebijakan untuk menambahkan jumlah angkatan laut di wilayah sekitar China, termasuk juga wilayah Laut China Selatan guna menjaga kepentingan strategis China.¹³

Xi Jinping juga menjadikan *The Chinese Dream* yang merupakan semboyan motivasi bagi para pemimpin China dalam menjalankan pemerintahannya sebagai landasan ideologis. *The Chinese Dream* pada pemerintahan Jinping adalah impian suatu bangsa dan juga impian masyarakat Tionghoa sehingga membentuk identitas nasional China. *The Chinese Dream* menggambarkan sikap ambisius China dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya, meliputi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Hal tersebut membuat China lebih agresif dalam mempertahankan klaimnya pada sengketa Laut China Selatan. Sikap agresif China di buktikan dengan secara aktif melakukan berbagai latihan militer di perairan Laut China Selatan, serta membangun pos militer dan landasan terbang di beberapa pulau di perairan tersebut.¹⁴

Tulisan kelima merupakan jurnal yang berjudul "*The United States' China Containment Strategy and the South China Sea Dispute*" oleh Victor Teixeira pada tahun 2019. Jurnal ini membahas upaya yang dilakukan Amerika Serikat agar China tidak dapat menguasai kawasan Laut China Selatan dan menjadi kekuatan hegemoni yang akan menyaingi Amerika Serikat. Upaya Xi Jinping dalam membangkitkan nama China di dunia serta kontrolnya di dalam negeri, menjadi tantangan tersendiri bagi Amerika Serikat. Pertumbuhan China yang

¹³ Anggia Rahmadini & Citra Hennida. p. 437.

¹⁴ Anggia Rahmadini & Citra Hennida. p. 438.

sangat stabil sebagai negara adidaya membuat Amerika Serikat merasa terancam, maka dari itu Amerika Serikat membuat strategi yang menahan atau memperlambat pertumbuhan China.

Kebijakan tersebut dikenal dengan kebijakan penahanan yang berusaha membatasi ekspansi China dan kesempatan China menjadi negara adidaya dapat berkurang. Salah satu dari upaya kebijakan penahanan itu adalah Amerika Serikat berupaya untuk bergabung dalam berbagai perjanjian diplomatik dengan negara-negara di sekitar kawasan China agar dukungan mereka terhadap China dapat beralih. Vietnam dan India merupakan salah satu negara yang berusaha Amerika Serikat dekati.

Upaya Amerika Serikat dalam menahan pertumbuhan ekonomi China cenderung gagal karena China telah berhasil meraih kekuatan regional dengan berbagai strategi ekonominya yang berjalan dengan sukses. China telah berhasil, membuat beberapa pengembangan ekonomi, seperti *Asia Infrastructure Investment Bank* (AIIB) yang memiliki anggota sebanyak 70 negara. China juga memimpin negosiasi pada *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). China juga hadir dalam sebuah perjanjian perdagangan global yang berupaya mengumpulkan sepuluh negara anggota ASEAN, dan juga beberapa negara di luar anggota ASEAN, seperti India, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Kelompok tersebut telah mewakili hampir dari setengah dari penduduk yang ada di dunia dan mampu mewakili sebagian besar Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Melihat banyaknya negara yang terlibat dalam pembangunan ekonomi dengan China, akan sulit bagi Amerika Serikat untuk

menghalangi pertumbuhan ekonomi China dan sulit pula mengumpulkan kawan untuk menekan klaim China atas Laut China Selatan karena banyak negara yang terlibat dalam perjanjian ekonomi bersama China. Negara-negara yang bermitra dengan China tidak ingin mengambil resiko akan merusak kemitraan mereka jika menentang klaim China atas Laut China Selatan.¹⁵

Berdasarkan dari seluruh rujukan *literatur review* yang telah mengulas perihal posisi China dalam sengketa Laut China Selatan. Secara umum China menunjukkan ketegasannya dalam menghadapi klaim Laut China Selatan terhadap beberapa negara tetangganya. Namun demikian, China juga melakukan upaya-upaya strategis melalui mekanisme kerja sama bilateral khususnya kepada Filipina. Penelitian ini memandang pendekatan lunak China menjadi hal yang menarik dan lebih strategis dalam upaya China mereposisi klaim atas Laut China Selatan. Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada upaya kerja sama bilateral China-Filipina di wilayah Laut China Selatan.

1.5. Landasan Teori dan Konsep

1.5.1. Peaceful Rise

Kebangkitan China yang damai atau bisa disebut dengan *The Peaceful Rise of China* adalah pembangunan yang ingin di capai China. Xi Jinping mengatakan:

¹⁵ Victor Teixeira, “ The United States’ China Containmnet Strategy and the South China Sea Dispute” Central European Journal of International and Security Studies, Vol. 13, No.3 (2019) dalam https://www.cejiss.org/images/issue_articles/2019-volume-13-issue-3/08-teixera.pdf

“China should expand mutually beneficial cooperation with other countries. China will adhere to an open, cooperative and win-win development model”¹⁶

Dalam sebuah dokumen *China Peaceful Development Road* terdapat 5 strategi yang dapat China tempuh untuk meraih kebangkitan ekonomi dalam suatu rangka pembangunan. Pertama adalah pembangunan damai merupakan cara yang ditempuh untuk menuju modernisasi China. Kedua, mempromosikan perdamaian dan pembangunan dunia beriringan dengan pertumbuhan China sendiri. Ketiga, reformasi dan inovasi dalam pencarian keuntungan bersama dan pembangunan umum bersama negara-negara lain. Keempat, pengembangan dengan bergantung pada kekuatan China sendiri. Kelima, membangun dunia yang harmonis dalam perdamaian yang berkesinambungan dan membangun kesejahteraan bersama.

Tujuan China dalam mengejar pembangunan damai adalah agar bisa mempromosikan pembangunan yang harmonis dan mencapai perdamaian internasional. China ingin menjalin hubungan jangka panjang dan saling menguntungkan dengan negara-negara lain. China akan membuka diri kepada dunia luar dan mempromosikan kerja sama yang saling menguntungkan. Selain mengejar kerja sama ekonomi, China juga memperluas kerja sama internasional di berbagai bidang seperti pertanian dan juga memperdalam kerja sama saling menguntungkan dengan negara-negara lain dalam melakukan pengembangan energi dan sumber daya alam.

China akan terus berupaya menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara lain berdasarkan Lima Prinsip Koeksistensi Damai, China akan

¹⁶ “China’s Development to Remain Peaceful: Xi” dalam http://in.china-embassy.gov.cn/eng/zt/peaceful/201301/t20130130_2377105.htm diakses pada 3 Juli 2022.

berusaha meningkatkan dialog ataupun negosiasi dengan negara-negara maju agar tercipta rasa saling percaya, memperdalam kerja sama yang saling menguntungkan, menangani segala perbedaan yang ada dengan benar, menggunakan segala cara untuk dapat membangun dan mengembangkan hubungan baru dengan negara-negara besar serta mempromosikan pertumbuhan jangka panjang.

China juga berupaya membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan memberlakukan negara tetangga sebagai mitra, untuk menciptakan lingkungan regional yang damai, stabil, dan saling percaya. Membantu negara-negara berkembang untuk mencapai pembangunan yang lebih baik dengan memberikan bantuan investasi dan mencapai kepentingan bersama. Secara ekonomi, negara-negara harus saling bekerja sama dan memanfaatkan kekuatan satu sama lain dan mengesampingkan perbedaan serta memberikan keuntungan bagi satu sama lain. Negara-negara juga harus membangun perdagangan internasional yang adil, terbuka, merata serta tidak membeda-bedakan. Negara-negara juga harus meningkatkan rasa saling percaya dan menyelesaikan berbagai perselisihan maupun konflik dengan jalan damai tanpa adanya perang, agar menjaga perdamaian dan stabilitas dunia.¹⁷

Peneliti menggunakan konsep *Peaceful Rise* untuk merepresentasikan upaya pendekatan China melalui jalan damai terhadap Filipina agar dapat meredam konflik sengketa Laut China Selatan. China berupaya membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan memberlakukan negara

¹⁷ “China’s Peaceful Development on White Paper” dalam http://in.china-embassy.gov.cn/eng/zt/peaceful/201109/t20110906_2377093.htm diakses pada 3 Juli 2022.

tetangga sebagai mitra, untuk menciptakan lingkungan regional yang damai, stabil, dan membangun rasa saling percaya.

1.5.2. Model Strategic

Menurut John P. Lovel dalam merumuskan suatu kebijakan, suatu negara pasti memiliki beberapa faktor yang membuat mereka memilih kebijakan tersebut, yang pertama adalah struktur sistem internasional, yang dimaksud struktur sistem internasional menurut Lovel disini adalah negara-negara di ibaratkan selalu berkompetisi. Negara-negara berada dalam suatu kompetisi dapat melakukan tawar-menawar serta negosiasi satu sama lain untuk membentuk suatu kerja sama.

Kedua adalah persepsi elit, yang dimaksud persepsi elit menurut Lovel disini adalah suatu perhitungan yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan nasional negaranya. Perhitungan ini akan merujuk kepada suatu hasil kebijakan yang diambil tersebut akan memberikan kerugian atau keuntungan.

Lalu, yang ketiga adalah strategi negara-bangsa lain, yang dimaksud strategi negara-bangsa lain menurut Lovel disini adalah keberhasilan dari kebijakan suatu negara tidak hanya ditentukan dari negara itu sendiri, tetapi juga ditentukan dengan melihat strategi negara lain. Agar kedua negara yang hendak melakukan kerja sama ini dapat mencocokkan strategi mereka.

Keempat adalah kapabilitas negara, menurut Lovel dalam mengambil kebijakan suatu negara harus memperhitungkan faktor-faktor yang sekiranya dapat digunakan sebagai tolak ukur kapabilitas suatu negara, sehingga suatu negara dapat membandingkan kapabilitas negaranya terhadap kapabilitas negara

lain dan dapat mengukur apakah kerja sama yang dijalin akan memberikan keuntungan atau kerugian.¹⁸

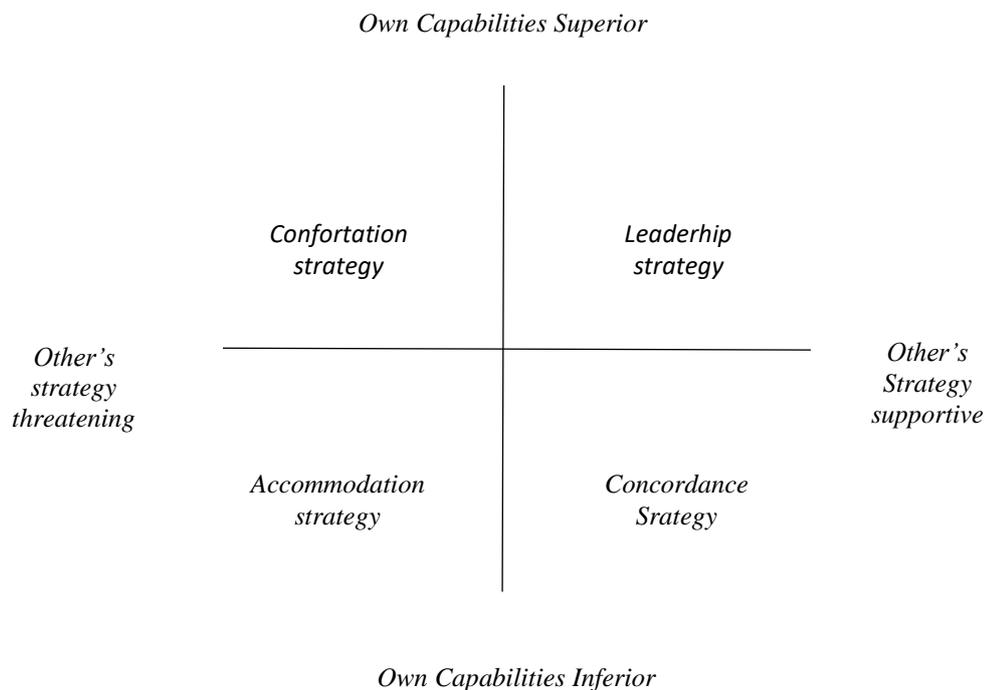
Keempat variabel diatas, dapat menentukan suatu pola interaksi negara yang meliputi, pertama adalah *leadership strategy* yaitu posisi yang dimiliki suatu negara dalam mengontrol negara lain melalui persuasi atau tawar menawar daripada menggunakan kekerasan. Pada tipe strategi ini suatu negara menganggap kapabilitasnya besar atau superior dan strategi negara-bangsa lainnya mendukung. Kedua adalah *concordance strategy* yaitu suatu kondisi dimana negara merasa bahwa kapabilitasnya lebih rendah daripada negara lainnya, sehingga menggunakan strategi melakukan kerja sama dengan negara lain yang dianggap mampu mendukung dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Ketiga adalah *accomodation strategy*, strategi ini merupakan kondisi dimana suatu negara merasa bahwa kapabilitasnya lebih rendah daripada negara lain, dan menganggap bahwa negara lainnya yang lebih besar merupakan suatu ancaman. Sehingga negara yang kapabilitasnya kecil tersebut akan melakukan strategi penyesuaian terhadap negara lain, agar terhindari dari konflik. Keempat adalah *confrontation strategy*, strategi ini merupakan kondisi dimana suatu negara menganggap kapabilitasnya lebih tinggi daripada negara lain, dan menganggap negara lain merupakan suatu ancaman dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Sehingga negara tersebut cenderung melakukan hal-hal yang menyebabkan konflik terhadap negara lainnya dan memaksa negara lain untuk mengakui kapabilitasnya.¹⁹

¹⁸ John P. Lovel, "Foreign Policy in Prespective: Strategy, Adaption, Decision Making" New York: The Dryden Press (1970), p.70-74.

¹⁹ John P. Lovel, pp.99.

Untuk lebih memperjelas bagaimana pola interaksi yang terbentuk dari beberapa variabel yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat pada tabel matriks berikut ini.

Bagan 1 Table Matriks *Model Strategic*

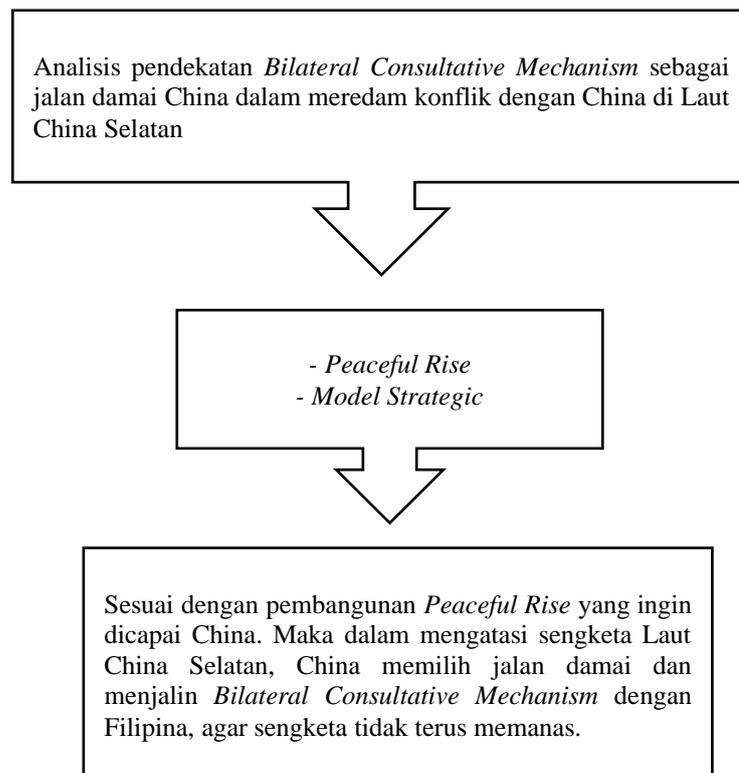


Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep *model strategic* untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi China dan Filipina dalam merumuskan kebijakan untuk melakukan kerja sama bilateral. Dimana dalam memutuskan suatu kebijakan setiap negara pasti memiliki faktor-faktor yang mendukung keputusan mereka. Berdasarkan dari pembangunan *Peaceful Rise China* pola interaksi yang China ciptakan ialah *leadership strategy* dimana lebih mengedepankan cara-cara persuasi atau tawar menawar tanpa menggunakan kekerasan.

1.5.3. Pre-Analisa

Implementasi dari teori dan konsep dalam penelitian ini akan menjabarkan proses berpikir yang akan digunakan untuk menganalisa dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

Bagan 2 Alur Pemikiran



1.6. Metodologi

1.6.1. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif (deskripsi), dalam buku Mohtar Mas'oeed ia mengatakan bahwa deskripsi adalah upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, kapan, berapa atau bagaimana.²⁰

²⁰ Mohtar Mas'oeed, "Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi" LP3ES, Jakarta, 1990, p. 68.

Penelitian deskriptif, yaitu deskripsi tentang fakta.²¹ Jenis penelitian deskriptif ini mengumpulkan seluruh data kemudian di analisis dan di bandingkan dengan fakta yang sedang terjadi, kemudian mencoba memberikan pemecahan atas masalah tersebut.

1.6.2. Metode Analisa

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kualitatif, yaitu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tulisan dalam bentuk data. Setelah itu, data yang diperoleh akan diuraikan untuk menjawab rumusan masalah.

1.6.3. Ruang Lingkup Penelitian

1.6.3.1. Batasan Waktu

Berdasarkan dari pemaparan data yang tersedia, batasan waktu yang dijadikan titik fokus dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2013-2021. Dimana pada 2013 adalah awal masa kepemimpinan presiden Xi Jinping. Penelitian ini juga terbatas pada masa periode kepemimpinan Presiden Filipina yaitu Rodrigo Duterte.

1.6.3.2. Batasan Materi

Dalam penelitian ini peneliti membatasi materi pada bagaimana *Bilateral Consultative Mechanism* sebagai jalan damai yang ditempuh China-Filipina dalam meredam sengketa Laut China Selatan pada masa kepemimpinan Xi Jinping dan Duterte.

1.6.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data melalui buku, artikel, jurnal,

²¹ Mohtar Mas' oed, pp. 261.

koran, serta penggunaan media internet melalui *website-website* yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji. Data yang telah dikumpulkan tersebut, kemudian ditelaah sehingga mendapatkan data-data tertulis yang dapat membantu penulisan penelitian ini.

1.7. Argumen Pokok

Peaceful Rise merupakan pembangunan damai yang ingin dicapai China dengan berusaha meningkatkan dialog maupun negosiasi dengan negara-negara lainnya agar tercipta rasa saling percaya dan memperdalam kerja sama yang saling menguntungkan. Untuk mencapai pembangunan damai tersebut, dalam meredam sengketa Laut China Selatan, China memilih melakukan kerja sama bilateral. Negara yang berhasil China ajak untuk melakukan kerja sama bilateral adalah Filipina.

Xi Jinping melihat potensi sumber daya alam di kawasan Laut China Selatan akan sangat menguntungkan apabila dapat di eksplorasi bersama. Pandangan Xi Jinping tersebut beriringan dengan pandangan presiden Filipina yaitu Duterte yang juga sadar akan potensi besar yang dimiliki Laut China Selatan. Kedua negara tersebut juga tidak ingin konflik di Laut China Selatan semakin memanas. Maka China dan Filipina sepakat memilih jalan damai dan melakukan *Bilateral Consultative Mechanism (BCM)* yang merupakan wadah bagi kedua negara untuk bertukar pandang tentang masalah-masalah apa saja yang terjadi di kawasan Laut China Selatan dan berusaha membangun rasa saling percaya serta menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan perselisihan. Di dalam BCM tersebut kedua negara juga menyepakati *joint*

development untuk melakukan eksplorasi minyak bersama di daerah yang disetujui oleh kedua negara.

1.8. Struktur Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam upaya mendapatkan jawaban atas rumusan masalah, maka pembahasan akan diuraikan secara garis besar melalui struktur penulisan, Adapun struktur penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori dan konsep, metode penelitian dan argumen pokok.

BAB II DINAMIKA DI LAUT CHINA SELATAN

Bab ini akan menguraikan bagaimana awal mula terjadinya sengketa dan potensi-potensi apa saja yang di miliki kawasan Laut China Selatan, sehingga para negara yang bersengketa tetap berupaya mempertahankan klaim mereka.

BAB III *BILATERAL CONSULTATIVE MECHANISM* SEBAGAI JALAN DAMAI YANG DITEMPUH OLEH CHINA DAN FILIPINA

Bab ini akan menguraikan *Bilateral Consultative Mechanism* yang terjalin antara China dan Filipina sebagai jalan damai dalam meredam sengketa Laut China Selatan.

BAB IV *BILATERAL CONSULTATIVE MECHANISM: PERSUASI* DAN PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN

SENGKETA WILAYAH DI KAWASAN LAUT CHINA SELATAN SECARA DAMAI

Bab ini akan menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi China dan Filipina untuk menjalin kerja sama dan melihat bagaimana pola interaksi yang tercipta dari faktor-faktor tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian.